

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik merupakan kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melakukan programnya. (Budiardjo,2008: 404).

Partai politik pertama kali lahir di Negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah. Partai politik umumnya dianggap sebagai manifestasi dari sistem politik yang sudah modern, maka partai politik sudah menjadi lembaga politik yang ada di setiap negara. (Budiardjo, 2008: 397)

Partai politik memiliki fungsi kontrol terhadap pemerintah, bila partai mempunyai posisi mengontrol badan legislatif maka, usaha fungsi partai untuk mengontrol pemerintah dan aktivitasnya yang dilakukan setiap hari melalui kekuasaannya dalam mengawasi dan mendukung seorang pemimpin.(Ichlasul Amal,2012: 32). Partai politik juga dipandang sebagai kekuatan politik yang paling dominan dan berpengaruh langsung terhadap kelangsungan pemerintahan berbeda

dengan organisasi lainnya seperti mahasiswa, pers, dsb. Partai politik mempunyai fungsi yang berkaitan langsung dengan dukungan, kekuasaan dan berperan dalam masalah ketatanegaraan baik berupa perwakilan politik masyarakat di parlemen, menyerap aspirasi masyarakat dan membuat kebijakan.

Menurut Dwight King dalam (Efriza dan Yoyoh 2015: 362) menyatakan peran utama parpol terbagi menjadi tiga macam yaitu:

1. Memberikan jembatan institusional antara warga dan pemerintah
2. Menghasilkan kebijakan-kebijakan yang ditawarkan kepada rakyat pemilih dan untuk dilaksanakan oleh pemerintah hasil pemilu
3. Jalur bagi proses kaderisasi dan seleksi politisi untuk mengisi jabatan politik.

Peranan partai politik lainnya sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan masyarakat, penghubung antara penguasa dan rakyat dalam arti sebagai lembaga yang ikut memainkan peranan dalam proses pembentukan kebijakan yaitu lembaga yang melakukan reaksi atas kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah daerah, kebijakan yang dibuat yaitu program gerbang desa. Kebijakan ialah upaya memahami dan mengartikan segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai satu masalah, penyebab, dan pengaruhnya. Pada era otonomi saat ini pemerintah membuka seluas-luasnya peluang untuk partisipasi masyarakat dalam pengembalian kebijakan publik. Dengan cara ini diharapkan muncul kebijakan publik yang dapat melindungi, mengayomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selaras, serasi, dan seimbang dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. (Dadang, 2015: 97).

Kabupaten Tasikmalaya salah satu wilayah tertinggi suara bagi PPP, karena Kabupaten Tasikmalaya memiliki identitas sebagai wilayah yang kental akan nilai-nilai islam. Nuansa islam yang menjadi identitas Kabupaten Tasikmalaya tercermin dari banyaknya tokoh-tokoh ulama yang berpengaruh dan berdirinya ratusan pesantren yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu juga, penegakkan nilai-nilai islam yang berada di Kabupaten Tasikmalaya hal ini kemudian dilakukan dengan aktivitas politik para ulama di Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya menjadi tempat sebagai hasil suara bagi PPP tidak dilepaskan dari gerakan politik para ulama yang di dukung dengan kultur masyarakatnya yang religius dengan perjuangan sebagai jalan mengimplementasikan nilai-nilai islam dalam lingkup pemerintahan negara, Islam di tempatkan sebagai ideologi partai PPP yang dominan menempati urutan terbesar di Kabupaten Tasikmalaya, PPP menjadi partai pemenang saat ini memilih PPP ataupun memilih kader PPP merupakan budaya yang sudah melekat bagi sebagian besar yang beragama Islam. Bangunan politik tersebut telah dibangun semenjak Orde Baru, karena pada masa tersebut seluruh umat Islam bergabung di dalam naungan PPP, sehingga memilih PPP merupakan suatu kewajiban karena merupakan bagian dari implementasi ajaran Islam. Tetapi dalam konteks pemilukada, memilih seorang pemimpin juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga dengan adanya persepsi tersebut masyarakat dapat meninggalkan keterikatan terhadap lembaga menjadi keterikatan yang lebih substansial, yaitu memilih dan memiliki seorang pemimpin.

PPP adalah partai islam paling senior dari partai islam yang ada sekarang, senioritas partai ini di mulai sejak tahun 1971 sebagai produk dari politik partai orde baru sehingga PPP adalah hasil penggabungan empat partai islam waktu itu, yaitu Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi, Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII, dan Partai Islam Perti. Alhasil selama lebih kurang tiga dekadee hingga akhirnya Soeharto jatuh pada 1998, PPP adalah satu-satunya yang mengakomodasi preferensi politik islam. Artinya, bagi setiap warga muslim yang mempunyai preferensi politik agama islam pasti akan menjatuhkan pilihannya ke PPP, tapi tidak otomatis warga muslim di Indonesia adalah PPP. Kusmayadi (2016:75-81).

Kekuatan PPP di Kabupaten Tasikmalaya secara kultural memang sangat kuat, kekuatan PPP di Kabupaten Tasikmalaya tidak hanya terdapat pada kekuatan struktural tetapi kekuatan kulturalnya juga yang sama-sama kuat dan ini dibuktikan PPP selalu memenangkan perolehan kursi terbanyak di setiap pemilu. Pada pemilukada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2009 PPP mendapatkan 14 kursi dan tahun 2014 mendapat 9 kursi.

Surbakti (2015: 149) Partai politik memiliki fungsi menjembatani kepentingan rakyat terhadap negara pembuat kebijakan melalui fungsi kepartaian diantaranya:

1. Sosialisasi Politik
2. Rekrutmen Politik
3. Partisipasi Politik
4. Pemadu Kepentingan
5. Komunikasi Politik

6. Pengendalian Konflik

7. Kontrol Politik.

Fungsi partai politik salah satunya fungsi kontrol politik ialah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah dalam melakukan suatu kontrol politik atau pengawasan harus ada tolok ukur yang jelas sehingga kegiatan itu bersifat relatif objektif. (Surbakti, 154:2010).

Dalam melaksanakan fungsi kontrol politik, partai politik juga harus menggunakan tolok ukur tersebut. Tolok ukur suatu kontrol politik berupa nilai-nilai politik yang dianggap ideal dan baik dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Tolok ukur itu pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan bersama sehingga seharusnya menjadi pegangan bersama. Berdasarkan kenyataan tidak semua fungsi dilaksanakan dalam porsi dan tingkat keberhasilan yang sama. Hal ini tidak hanya bergantung pada sistem politik menjadi konteks yang melingkupi partai politik, tetapi juga ditentukan oleh faktor lain.

Fungsi kontrol terhadap kebijakan Gerbang Desa sebuah kebijakan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan kebijakan dari pembuatan program pemerintah untuk dijalankan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan Program Gerbang Desa bisa dikontrol oleh partai politik dimana partai politik menjalankan fungsi kontrol tersebut.

Gerbang Desa adalah program prioritas yang berpihak kepada masyarakat pedesaan di Kabupaten Tasikmalaya. Program ini mengarahkan para pemangku

kepentingan di Kabupaten Tasikmalaya untuk kembali pulang ke desa guna membangun desa. Ada lima program prioritas yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Peningkatan kesejahteraan, petani, buruh tani, nelayan dan aparat desa
2. Peningkatan jalan desa
3. Listrik Masuk desa
4. Irigasi, air bersih perdesaan dan sanitasi lingkungan pedesaan
5. Telekomunikasi dan Informasi masuk desa.

Dalam konteks Gerbang Desa PPP berfungsi sebagai salah satu jenis partai *catch-all*, PPP masuk ke dalam bagian partai *catch-all* karena partai *catch-all* berasal dari partai massa yang memprofesionalisasi organisasi kepartaiannya dan melakukan penyesuaian ideologi dengan tujuan bisa merangkul pemilih yang lebih luas diluar basis kelas maupun agama tempat mereka berasal. Asal-usul partai adalah transformasi dari partai massa, partai ini adalah pertalian atau penyatuan antara massa dengan kelompok kepentingan. Partai *catch-all* adalah partai massa yang berusaha memperluas basis pendukungnya dengan membuka diri terhadap kelompok-kelompok sosial diluarnya. Mengikuti konseptualisasi Wolinetz (Dalam Pamungkas, 2011: 38-39).

Partai *catch-all* atau elektoralis adalah berorientasi pada pencari suara (*vote-seeking*). Pada partai ini perdebatan tentang kebijakan kurang begitu menonjol. Kalaupun ada perdebatan tentang kebijakan publik biasanya terbatas pada pimpinan partai atau pada komite kebijakan partai. Konsistensi asumsi posisi kebijakan partai berubah-ubah tergantung pada arahan pemimpin dan struktur kesempatan elektoral. Kebijakan partai adalah menyesuaikan strategi partai, yaitu maksimalisasi suara

pemilih. Infrastruktur partai untuk mendukung kebijakan terbatas, artinya biro riset atau komite kebijakan partai terlalu kuat sementara itu, penggunaan teknik-teknik baru dalam pemilu seperti pemasaran politik sangat tinggi. (Dalam Pamungkas, 2011: 37-39).

Melalui pendekatan ini Gerbang Desa yang digagas oleh Bupati, terinspirasi oleh fakta dan data khususnya daerah pedesaan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang belum tersentuh oleh pembangunan, baik infra struktur perhubungan, perekonomian rakyat pedesaan, pendidikan, pertanian, dan sebagainya. Kondisi tersebut menyadarkan, seluruh komponen masyarakat, aparat pemerintahan daerah atau desa, Bupati pada waktu itu, untuk mencanangkan program percepatan pembangunan di daerah pedesaan. Program dimaksud diberi nama Gerakan Bangun Desa (Gerbang Desa).

Pengaruh Partai PPP terhadap Gerbang Desa akan memiliki elektabilitas respon positif dari sejumlah kalangan, baik di kalangan pemuka agama, kalangan masyarakat, pemerintahan desa, program ini tidak akan berhasil jika hanya sebatas jargon politik semata, kurangnya daya dukung sumberdaya manusia yang profesional, sumber biaya yang memadai, kerjasama komponen pemerintah daerah dengan lembaga Desa dan masyarakat, Gerbang Desa membutuhkan kerjasama dan peran aktif semua pihak, mulai dari organisasi pemerintah dan partai PPP yang membantu mensosialisasikan serta dibutuhkan daya dukung regulasi untuk operasionalisasi Gerbang Desa. Dalam hubungan ini Gerbang Desa secara eksplisit disatukan dalam bentuk rencana strategis pembangunan Kabupaten Tasikmalaya, atau dalam program percepatan pembangunan yang memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini dilakukan

agar pada tataran operasionalnya tidak mengalami hambatan atau kendala baik secara teknis administratif, maupun dalam masalah politis, sehingga implementasi Gerbang Desa terdapat sinkronisasi dengan program-program lain di tingkat Desa.

Kebijakan gerbang desa pada periode UU Ruzhanul Ulum yakni pembangunan yang berasal dari desa sebagai konsep pembangunan yang di mulai dari pedagang kecil, Buruh tani serta nelayan, Peningkatan jalan Desa, Listrik Masuk Desa , Irigasi air bersih pedesaan dan sanitasi lingkungan pedesaan, Telekomunikasi dan Informasi masuk Desa, Tujuannya agar mereka tidak perlu keluar dari tempatnya jika semuanya sudah tersedia di Desa. Kebijakan Gerbang Desa ini mewakili pemerintahan dalam penataan birokrasi serta keahlian dan kemampuan masyarakat. Kebijakan publik merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka merumuskan artikulasi kepentingan seluruh *skateholder* (pemegang pelaksanaan tugas) dalam rangka menyelesaikan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga dalam proses pembuatan kebijakan publik pun perlu dipayungi dengan payung pluralitas dimana memungkinkan seluruh *skateholder* untuk turut andil dalam rangka merumuskan kebijakan publik.

Gerbang desa yang diusung oleh Bupati terpilih pada pemilukada Kabupaten Tasikmalaya 2011, terinspirasi oleh fakta dan data dilapangna khususnya daerah pedesaan yang belum tersentuh oleh pembangunan baik infrastuktur perhubungan, perekonomian desa, pendidikan, pertanian dan sebagainya. Kondisi tersebut menyadarkan kepada kita dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Tasikmalaya pemerintah desa dan pribadi H. UU Ruzhanul Uum sebagai salah satu kandidat bupati

pada waktu itu untuk mencanangkan program percepatan pembangunan di daerah pedesaan. Program tersebut di beri nama Gerakan bangun desa (Gerbang desa). Gerakan ini menjadi produk unggulan pada pemilu pada 2011. Pada awalnya gerakan ini disosialisasikan dan dilakukan oleh H. UU Ruzhanul Ulum dan sejumlah pemuka agama atau masyarakat dan alumni huda yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Selama periode 2011/2016 Kabupaten Tasikmalaya memiliki program Gerbang Desa yakni pembangunan yang berasal dari desa. Data menyebutkan lebih dari 20% rakyat miskin dan pengangguran di kabupaten ini berada di desa yang jarang tersentuh program pembangunan dan pemberdayaan. Data menyebutkan, 80% warga Kabupaten Tasikmalaya bermata pencaharian petani dan buruh tani karena luas wilayahnya didominasi lahan sawah dan perkebunan. dan masih terdapat lahan kosong yang tidak di gunakan. Optimalisasinya disesuaikan dengan potensi desa itu sendiri baik untuk pertanian, perkebunan, perikanan, maupun peternakan.

Tabel. 1.1

Potensi Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Tasikmalaya

No	Jenis	Lokasi	Kapasitas Produksi
1.	Karet	Salopa, Cipatujah, Jatiwaras	1.143,19 ton/tahun
2.	Cengkeh	Puspahiang, Salawu, Bojonggambir	32,43 ton/tahun
3.	Lada	Cipatujah, Karangnunggal, Bojonggambir	17 ton/tahun
4.	Nilam	Sukaresik, Pargerageng, Sariwangi, Leuwisari	90.70 ton/tahun
5.	Kelapa	Kabupaten Tasikmalaya	22,645 ton/tahun
6.	Kopi	Kabupaten Tasikmalaya	5,466 ton/tahun
7.	The	Taraju, Bojonggambir, Sodonghilir, Salawu	10,264 ton/tahun

Sumber: Prosiding Tim Dosen Fisip Unsil

Sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Tasikmalaya seperti di atas, merupakan nilai-nilai potensial daerah, nilai potensial dimaksud perlu ditumbuhkan dan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Sumber daya alam lainnya pertanian, besarnya kontribusi sektor tersebut perlu ditindaklanjuti secara modernisasi dan industri pengelolaan hasil sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing produksi di masa mendatang. Komoditas unggulan di sektor agribisnis sebagai berikut:

Tabel 1.2
Sentra Produksi Komoditi Unggulan Kabupaten Tasikmalaya

No.	Jenis Komoditi Unggulan	Kecamatan
1.	Padi	Tersebar di 39 Kecamatan
2.	Padi Organik	Manonjaya, Sukahening, Sukaraja, Sukaresik, Salawu, Cisayong dan Cineam
3.	Jagung	Karangnunggal, Bantarkalong, Cipatujah, Pancategah, Salopa, Cibalong, Salawu, Cigalontang, Kadipaten, Rajapolah Ciawi, Cineam
4.	Kacang Tanah	Cineam, Karangjaya, Pancatengah, Kadipaten, Cikatomas, Cikalong
5.	Kedelai	Jatiwaras, Cipatujah, Jamanis, Pancatengah

Sumber: Bappeda Kabupaten Tasikmalaya

Sebagai komoditi tanaman pangan Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan pilihan prioritas adalah padi, dengan lokasi sentra pengembangannya meliputi 39 kecamatan. Berdasarkan data pada tahun 2017 produktivitas padi sawah adalah 67,59 kw/ha dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 68,53 kw/ha, sehingga dapat menaikkan produksi padi sawah dari 879.830 ton menjadi 894.748 ton. Kenaikan ini terjadi karena adanya kontribusi dari produktivitas padi organik dan kenaikan luas panen dari 130.164 pada Tahun 2017 menjadi 130.658 ha pada tahun 2018.

Tabel 1.3
Perkembangan Realisasi Tanam, Panen,
Produksi dan Produktivitas Padi Organik Tahun 2017-2018

No	Tahun	Tanam (ha)	Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (kw/ha)
1	2017	10.056	9.342	73.427	78,59
2	2018	9.510	9.154	79.231	86,55

Sumber: Bappeda Kabupaten Tasikmalaya

Di sektor pertanian tanaman pangan khususnya padi, Kabupaten Tasikmalaya telah mengembangkan padi organik. Negara tujuan ekspor beras organik meliputi: Amerika, Malaysia, Singapura, Jerman, UEA, Italia dan Belanda. Untuk menjamin kualitas serta pemasaran produk para petani di kabupaten yang tergabung dalam gabungan kelompok tani (Gapoktan) telah menjalin kerjasama kemitraan dengan PT. Bloom Agro dan Gapoktan SIMPATIK, Koperasi SIMPATIK. Beras organik yang diekspor oleh Gapoktan Simpatik pada tahun 2018 sebanyak 81,309 ton ke USA, Malaysia, Singapura, Italia. Sedangkan dari Gapoktan Wangunsari Cisayong, Kelompok Ekonomi Produktif Lautan Mas Pagerageung dan Koperasi Sauyunan

Salawu, Kelompok Tani Cilampung Padakembang lokal (supermarket-supermarket lokal) maupun nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana Fungsi Kontrol Partai Persatuan Pembangunan Dalam Mengawasi Pelaksanaan Program Gerbang Desa di Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, penulis ingin memperoleh sasaran yang ingin dicapai dari apa yang penulis kerjakan dalam tulisan ini yaitu Untuk Mengetahui bagaimana Peran Fungsi Partai Persatuan Pembangunan dalam Mengawasi Pelaksanaan Program Gerbang Desa di Kabupaten Tasikmalaya.

D. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini penulis melakukan pembatasan terhadap masalah yang ada dan telah dirumuskan agar terarah dan terkonsentrasi dalam melakukan penelitian. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah membahas bagaimana Peran Partai Persatuan Pembangunan dalam Mengawasi Pelaksanaan Program Gerbang Desa di Kabupaten Tasikmalaya, Yang akan penulis teliti adalah fungsi kontrol partai politik.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan atau kontribusi pada perkembangan ilmu politik dalam kajian studi kebijakan serta untuk menambah dan memberikan manfaat bagi pengembangan wacana ilmu politik dan tambahan alternatif untuk penelitian lanjutan yang sejenis, khususnya tentang Peran Partai Persatuan Pembangunan dalam Mengawasi Pelaksanaan Program Gerbang Desa di Kabupaten Tasikmalaya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan mengenai bagaimana Peran Partai Persatuan Pembangunan dalam Mengawasi Pelaksanaan Program Gerbang Desa di Kabupaten Tasikmalaya, sehingga dalam penelitian ini dapat memberikan informasi, kontribusi dan masukan kepada pengamat, para politikus, dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan dalam kajian dan pengembangan.